



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**LKJIP
2022**

Sungai Raya, 2023

**JL. Supadio, Sungai Raya - Kabupaten Kubu Raya
email : diskominfo@kuburayakab.go.id**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing bidang yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas LAKIP serta Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 065/4929/RO-ORG tanggl 21 Desember 2022 Hal Penyusunan Laporan Kinerja 2022 dan Perjanjian Kinerja 2023.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 juga dilaksanakan sesuai dengan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya pada tahun anggaran 2022.

Demikian laporan ini disampaikan, atas belum sempurnanya penyusunan ini disampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya



EDDY MUDIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660823 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....1

DAFTAR ISI.....2

BAB I PENDAHULUAN3

 A. GAMBARAN UMUM3

 1. Pendahuluan3

 2. Susunan Organisasi4

 3. Tupoksi.....4

 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)4

 5. Sarana dan Prasarana5

 B. PERMASALAHAN UTAMA7

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....8

 A. RENSTRA.....8

 1. Visi9

 2. Misi.....11

 3. Tujuan12

 B. PERJANJIAN KINERJA14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA17

 A. CAPAIAN KINERJA17

 B. REALISASI ANGGARAN5

BAB IV PENUTUP8

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dikembangkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN menyatakan akuntabilitas sebagai salah satu azas umum dalam penyelenggaraan negara. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 69 disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah. Dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah" dalam ketentuan ini adalah Laporan Kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan Komunikasi dan Informatika masyarakat. Informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu Lembaga.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan keuangan, anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan sarana prasarana dan ketatausahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 75), dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Komunikasi dan Informatika.

3. Tupoksi

Adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan program kerja di Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - 2) Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
 - 3) Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika;
 - 4) Penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - 5) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Komunikasi dan

Informatika;

- 6) Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- 7) Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- d. Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi
- e. Bidang Layanan E-Government
- f. Bidang Persandian
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok JF



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA



BUPATI KUBU RAYA,

H. MUDA MAHENDRAWAN, S.H

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2022 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 66 orang terdiri dari 29 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 37 tenaga Non ASN. Adapun rincian tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah	Eselon	Jenis Kelamin
1	Kepala Dinas			
2	Sekretaris Dinas			
3	Kepala Bidang			
4	Kepala Seksi/Sub Bagian			
5	Sub Koordinator			
6	Jabatan Fungsional			
7	Pelaksana			

Sedangkan tenaga Non ASN terdiri dari :

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin
1	Kepala Dinas		
2	Sekretaris Dinas		
3	Kepala Bidang		
4	Kepala Seksi/Sub Bagian		
5	Sub Koordinator		
6	Jabatan Fungsional		
7	Pelaksana		

5. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana Komunikasi dan Informatika dan penunjang sarana Komunikasi dan Informatika yang tersedia di Kabupaten Kubu Raya berupa rumah sakit umum, puskesmas, klinik pratama dan klinik utama, praktek dokter/dokter gigi, praktek dokter spesialis/dokter gigi spesialis, praktek bidan mandiri, laboratorium klinik, apotik, toko obat, optik dan usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan lain sebagainya. Data sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika digambarkan pada tabel 1.3 dan tabel 1.4 berikut di bawah ini.

NO	URAIAN	TAHUN 2022	KONDISI
1	Antena Rocket Disk	9 Unit	Baik
2	Radio Ubiquity Rocket M5	9 Unit	Baik
3	Acces Point Indoor TP Link	8 Unit	Baik
4	Mikrotik 915 2HND	9 Unit	Baik
5	Power Beam M5-400	2 Unit	Baik
6	Radio Ubiquity Nanostation M5	6 Unit	Baik
7	Unifi Uap AC P	4 Unit	Baik
8	Sectoral AM5G19 120	2 Unit	Baik
9	Radio Ubiquity Bullet 2HP 800 mW	4 Unit	Baik
10	Server (Untuk Database SID)	1 Unit	Baik
11	Note Book / Laptop	1 Unit	Baik
12	Printer Deskjet	2 Unit	Baik
13	Scanner	1 Unit	Baik
14	UPS 1000 VA	1 Unit	Baik
15	Laptop (Egov)	1 Unit	Baik
16	Hardisk Backup	1 Unit	Baik
17	Laptop Sekretariat	2 Unit	Baik
18	Kursi Sekretariat	4 Unit	Baik
19	Printer A3	1 Unit	Baik
20	Sepeda Motor Renja	1 Unit	Baik
21	Kamera	1 Unit	Baik
22	Drone	1 Unit	Baik
23	Go Pro	1 Unit	Baik
24	Tripod Video	1 Unit	Baik
25	Monitor Video	1 Unit	Baik
26	Mic Reporter	1 Unit	Baik

27	Ipad Pro	1 Unit	Baik
28	Hyardisk Server	10 Unit	Baik
29	Pembangunan Tower Triangle Kantor Desa Sungai Dungun	1 Unit	Baik
30	Stabilizer Server	1 Unit	Baik
31	UPS Server	1 Unit	Baik
32	Rak Server	2 Unit	Baik
33	Aki	6 Unit	Baik
34	Pembangunan Tower Triangle Kantor Desa Kampung Baru	1 Unit	Baik
	Pembangunan Tower Triangle Kantor Desa Seruat Dua	1 Unit	Baik
35	Pembangunan Tower Triangle Kantor Kecamatan Kubu	1 Unit	Baik
36	Dispenser	3 Unit	Baik
37	AC 2 PK	2 Unit	Baik
38	AC Floor Standing 2 PK	1 Unit	Baik
39	TV	3 Unit	Baik
40	Exhaust Fan	1 Unit	Baik
41	Stand Fan	1 Unit	Baik
42	Karpet Permadani	1 Unit	Baik
43	Vacuum Cleaner	1 Unit	Baik
44	Laptop	3 Unit	Baik
45	PC (Editing)	1 Unit	Baik
46	Web Cam (HD 1080)	2 Unit	Baik
47	Monitor LED	1 Unit	Baik
48	Stabilized Handheld Camera	1 Unit	Baik
49	Stabilized Handheld Camera	1 Unit	Baik
50	Scanner IKP	1 Unit	Baik
51	Printer Renja Perlengkapan Umum	2 Unit	Baik
52	Laptop IKP	1 Unit	Baik
53	PC Komputer Perlengkapan Umum	2 Unit	Baik
54	Kamera IKP	1 Unit	Baik
55	Lensa Canon IKP	1 Unit	Baik
56	Memory Card IKP	1 Unit	Baik

57	Card Reader IKP	1 Unit	Baik
58	Tripod IKP	1 Unit	Baik
59	Sound System IKP	1 Unit	Baik

B. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, urusan pemerintahan bidang persandian dan pogram penunjang urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki nomenklatur dan uraian tugas yang berbeda dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya sehingga akan menyulitkan dalam perumusan indikator kinerja utama.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra)-SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

1. Visi

Visi Dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kubu Raya

Visi dan Misi Bupati Kubu Raya adalah **“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius ”**, dengan misi yang mendukung terwujudnya visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good and Clean Governance*).
2. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang lebih berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religious di seluruh lapisan masyarakat.
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya terjabar dalam program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Adapun program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dimaksud sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program pengembangan data/informasi
6. Program pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan aparatur pemerintah daerah
7. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
8. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
9. Program pengembangan dan implementasi E-Government
10. Program pengamanan informasi pemerintah daerah.

Visi Pembangunan Daerah jangka menengah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Bahagia diartikan sebagai kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :

1. Peningkatan derajat Komunikasi dan Informatika
2. Peningkatan derajat Pendidikan
3. Pekerjaan yang memadai
4. Pendapatan rumah tangga yang memadai
5. Keharmonisan keluarga
6. Ketersediaan waktu luang
7. Keharmonisan hubungan sosial
8. Kondisi rumah dan aset yang layak
9. Lingkungan hidup yang berkualitas
10. Keamanan yang kondusif

Bermartabat diartikan sebagai harga diri Masyarakat Kabupaten Kubu Raya dengan ditandai adanya :

1. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan.
2. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal.
4. Peningkatan kemandirian sumber daya manusia, aparatur sipil negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
5. Jaminan keadilan terdepan disini dimaksudkan Kabupaten Kubu Raya terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata Kelola pemerintahan yang bersih, dan berwibawa (good and clean governance) serta peningkatan inovasi, kreativitas, dan kualitas masyarakat.

Berkualitas berarti Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level Pemerintah, Swasta, Maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun

Komunikasi dan Informatika dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitas meraih prestasi di berbagai sektor dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Religius berarti Kabupaten Kubu Raya akan berusaha mengembangkan karakter sumber daya manusia dengan selalu menerapkan nilai-nilai Agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, Serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya

2. Misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai Topoksi dengan menjalankan MISI yaitu Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance } dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, Perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas mengurus 3 (tiga) urusan pemerintahan seperti tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan, menjalankan konsultasi, dan pelaksanaan reformasi birokrasi serta meningkatkan daya saing daerah

3. Tujuan

Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pelayanan publik daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Sasaran RPJMD yang menjadi tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2019-2024,

1. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Dengan Sasaran dan Indikator :

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas laporan keuangan Perangkat Daerah/ Nilai SAKIP PD,
Indikator = Nilai Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah / Nilai SAKIP PD
2. Meningkatnya hasil evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi-PD. (Pengungkit + Hasil)
Indikator = Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)
3. Meningkatnya hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, Indek KI Kabupaten
Indikataor = Kualifikasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik
4. Meningkatnya Prediksi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten
Indikator = Jumlah Bobot Penilaian domain : Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE

5. Meningkatnya Prediksi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten, Indeks SPBE Kabupaten

Indikator = Jumlah nilai unsur pelayanan : Persyaratan Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya / Tarif, Produk Layanan, Kompetensi pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerimaan amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informaika berisi Sasaran strategis, Indikator sasaran dan Target yang akan dicapai dalam tahun tertentu. Berikut ini dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas laporan keuangan Perangkat Daerah, Nilai Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah/SAKIP-PD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	(61,00) Baik	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Meningkatnya hasil evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah, Indeks Reformasi Birokrasi-PD	1. Nilai RB Perangkat Daerah	Indeks	B (64,50)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Meningkatnya hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, Indek KI-Kabupaten	1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten	Indeks	70,89	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Meningkatnya Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten, Indeks SPBE Kabupaten	1. Nilai SPBE Kabupaten	Indeks	2,60	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Nilai IKM Perangkat Daerah	Indeks	88,31	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

	Perangkat Daerah, Indeks IKM - PD				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

Untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya tahun 2022, mendapat dukungan anggaran dari APBD dan sumber lainnya yang sah sebesar **Rp 8.463.336.778,00** yang digunakan untuk melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022

NO	PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN
I.	PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.752.839.425,00
1.	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.075.919,00
1)	SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.599.978,00
2)	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.446.640,00
3)	SUB KEGIATAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.029.301,00
2.	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.973.590.090,00
1)	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.949.206.441,00
2)	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.879.639,00
3)	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	6.504.010,00
3.	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.901.634,00
1)	SUB KEGIATAN Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	81.279.050,00
4.	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.245.658,00
1)	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.343.000,00
2)	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.472.510,00
3)	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.148,00
4)	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.830.000,00
5.	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.953.330,00
1)	SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.953.330,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban kinerja instansi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

Pada Bab ini akan disampaikan uraian pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan dan permasalahan.

Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja *financial* organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut:

	Realisasi	
Persentase Capaian =		X 100%
	Rencana	

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu tahun 2022 dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya lebih dari 90% dari target dan mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya.

Berikut penjelasan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 berfokus pada Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1	Terbentuknya Kabupaten Branding sehingga meningkatkan Kepercayaan Publik	Indeks Nilai Keterbukaan Informasi / Indeks KI)	85	70,26	83
2	Terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung-jawabkan, mudah dikases dan dibagipakaikan, serta dikelola secara sesama, terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah/IKM PD	88,71	84,69	95
3	Terselenggaranya Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah / Nilai SAKIP-PD	61	N/A	-
4	Terselenggaranya Perangkat Daerah yang Bersih dan Kapabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah / Nilai RB - PD	60	59,10	99
5	Terselenggaranya Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi didukung sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dan Keamanan Informasi yang berkualitas	Nilai SPBE Kabupaten	2,30	2,34	90

Dari tabel 3.1 pada Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin pencapaian indikator sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 realisasinya sebesar 86,37 (Baik), nilai realisasi ini menunjukkan lebih baik dari target sebesar 86,00 (Baik). Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat dikategorikan berhasil dengan pencapaian indikator sasaran adalah 100,43%.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- 2) Administrasi Keuangan;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Nilai SAKIP

Indikator Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya untuk tahun 2022 ditetapkan dengan target B (64,50). Untuk capaian indikator kinerja utama Nilai SAKIP tahun 2022 belum dapat ditetapkan karena hasil capainya masih dalam proses review. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Nilai SAKIP adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.2
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	PRORAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1.	Terbentuknya Kabupaten Branding sehingga meningkatkan Kepercayaan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				83%	
2.	Terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung-jawabkan, mudah dikases dan dibagipakaikan, serta dikelola secara sesama, terintegrasi dan berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				95%	
3.	Terselenggaranya Perangkat Daerah yang Bersih dan Kapabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				99%	
4.	Terselenggaranya Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel					N/A	
5	Terselenggaranya Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi didukung sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dan Keamanan Informasi yang berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				90%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan pencapaian kinerja

Berdasarkan Tabel Efisiensi penggunaan Sumber Daya dengan Sasaran Strategis bagi SKPD dan Masyarakat perdesaan di wilayah KKR pada Program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tingkat efisiensi sebesar 1,3%%. Diperoleh dari target anggaran kinerja sebesar **Rp. 4.642.330.140.00** di kurang dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 4.594.447.812.00** atau sebesar **98 %** Dengan realisasi tersebut menunjukkan program tersebut telah dilaksanakan secara optimal dengan melakukan efisiensi terhadap anggaran yang disediakan.
- b. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik tingkat efisiensi sebesar 2,43% Diperoleh dari target anggaran kinerja sebesar **Rp. 460.810.142.00** Dikurang dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 449.634.015.00** atau sebesar **97,57 %** Dengan realisasi tersebut menunjukkan program tersebut telah dilaksanakan secara optimal dengan melakukan efisiensi terhadap anggaran yang disediakan.
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika tingkat efisiensi sebesar 0,8 % Diperoleh dari target anggaran kinerja sebesar **Rp. 3.110.652.502.00** Dikurang dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 3.108.035.250.00** atau sebesar **99,92%** Dengan tingkat efisiensi tersebut menunjukkan program tersebut telah dilaksanakan secara optimal dengan melakukan efisiensi terhadap anggaran yang disediakan.
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial tingkat efisiensi sebesar 0,1 % Diperoleh dari target anggaran kinerja sebesar **Rp. 79.224.405.00** Dikurang dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 79.240.090.00** atau sebesar **99,99%** Dengan tingkat efisiensi tersebut menunjukkan program tersebut telah dilaksanakan secara optimal dengan melakukan efisiensi terhadap anggaran yang disediakan.

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi tingkat efisiensi terhadap anggaran yang disediakan sebesar 1,34% Diperoleh dari target anggaran sebesar **Rp. 205.299.783.00** Dikurang dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 202.540.234.00** atau sebesar **98,66%** Dengan tingkat efisiensi tersebut menunjukkan program tersebut telah dilaksanakan secara optimal dengan melakukan efisiensi terhadap anggaran yang disediakan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4
Realisasi kinerja serta capaian kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI								
			2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terbentuknya Kabupaten Branding sehingga meningkatkan Kepercayaan Publik	Indeks Nilai Keterbukaan Informasi / Indeks KI	70,00	62,32	89%	85,00	69,84	82%	85,00	70,26	83%
2	Terselenggaranya Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi didukung sistem jaringan intra Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,97	2,97	100%	2,60	2,30	88%	2,60	2,34	90%
3	Terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung-jawabkan, mudah dikases dan dibagipakaikan, serta dikelola secara sesama, terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah/IKM PD	88,71	88,71	100%	88,71	83,65	94%	88,71	84,69	95%
J U M L A H					96%			89%			89%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel 3.5
Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2023
			2020	2021	2022	
1	Terbentuknya Kabupaten Branding sehingga meningkatkan Kepercayaan Publik	Indeks Nilai Keterbukaan Informasi / Indeks KI	62,32	69,84	70,26	85,00
2	Terselenggaranya Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi didukung sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dan Kemanan Informasi yang berkualitas	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,97	2,30	2,34	3,00
3	Terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung-jawabkan, mudah diakses dan dibagikan, serta dikelola secara bersama, terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah/IKM PD	88,71	83,65	84,69	88,71

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.5
Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2022	TARGET NASIONAL ¹⁾
1	Terbentuknya Kabupaten Branding sehingga meningkatkan Kepercayaan Publik	Indeks Nilai Keterbukaan Informasi / Indeks KI sebesar 85 Kategori Informatif Zona Hijau	70,26	99,80
2	Terselenggaranya Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi didukung	Nilai SPBE sebesar 2,97 Kategori Baik	2,34	3,28

	sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dan Kemanan Informasi yang berkualitas			
--	--	--	--	--

Ket :

1) Target Nasional diambil dari nilai tertinggi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

a. Indeks Nilai Keterbukaan Informasi

Indeks Nilai Keterbukaan Informasi belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan terlebih lagi target nasional dikarenakan belum maksimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 hingga Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut atau dikenal dengan Perki SLIP

serta belum terpenuhi dengan baik unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mengumumkan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 9 UU KIP, Pasal 11 Perki SLIP;
2. Menyediakan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 11, 14, dan 15 UU KIP, Pasal 13 Perki SLIP;
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 7 dan 12 UU KIP, Pasal 4, 8 dan 9 Perki SLIP;
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Pasal 13 UU KIP, Pasal 7 Perki SLIP;
5. Komitmen, Koordinasi dan Inovasi Badan Publik sesuai SK Komisi Informasi Pusat No. 3 Tahun 2018.

b. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan terlebih lagi target nasional dikarenakan belum maksimalnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019

B. REALISASI ANGGARAN

Dari pagu anggaran Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk belanja operasional dan belanja modal sebesar **Rp210.566.997.074,63** telah direalisasi sebesar **Rp 193.409.582.446,00** atau **91,85 %**. Berikut ini rincian realisasi anggaran per program-Kegiatan-Sub Kegiatan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1.				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.831.878	101.811.180	99,01%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	45.446.640	38.343.850	84,37%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.029.301	27.758.600	92,44%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.726.946.306	3.715.654.181	99,70%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	17.879.639	16.179.600	90,49%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	6.504.010	6.078.700	93,46%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.343.000	5.343.000	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.666.710	55.526.650	99,75%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.625.148	14.625.000	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	3.600.000	100,00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.403.000	74.228.000	99,76%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.488.330	16.485.000	99,98%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	170.450.000	153.095.103	89,82%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.346.730	270.341.900	100,00%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.647.048	23.454.648	81,87%

	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	29.720.000	29.720.000	100,00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.607.900	12.407.900	91,18%
2.	Meningkatnya hasil evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi-PD (dari 52,04 menjadi 70 / 35%).			
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.794.500	29.794.500	100,00%
3.	Meningkatnya hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, Indek KI Kabupaten (dari 69,84 menjadi 70/6,22%).			
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	260.211.404	253.110.900	97,27%
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	121.513.215	117.924.215	97,05%
	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	44.200.733	43.714.300	98,90%
	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.884.790	34.884.600	100,00%
4.	Meningkatnya Prediksi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten, Indeks SPBE Kabupaten (dari 2,30 menjadi 2,60 / 13%)			
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	141.223.610	141.187.600	99,97%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	25.000.000	24.623.600	98,49%
	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	177.084.100	175.871.700	99,32%
	Sub Kegiatan Penyelenggaran Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	288.726.320	288.569.850	99,95%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	24.383.137	24.382.600	100,00%
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Elektronik	79.799.635	79.763.600	99,95%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Dearah	2.150.275.000	2.149.576.600	99,97%
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	50.022.050	49.986.050	99,93%
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Daerah	174.138.650	174.073.650	99,96%
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	46.425.980	44.787.800	96,47%

	Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.659.560	115.539.000	99,04%
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.214.243	42.213.434	100,00%
5.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Indeks IKM – PD (dari 82,50 menjadi 83,65 / 1,39%)			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan Analisis dan Diseminiasi Data Statistik Sektoral	79.244.405	79.240.090	99,99%
Total	8.498.336.972	8.433.897.401	99,24%	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 disusun mengacu pada Renstra yang memuat visi dan misi sebagai salah satu pedoman pengambilan keputusan secara tepat dalam penyusunan dan penyelenggaraan program yang direncanakan pada Tahun 2022.

Secara umum dikemukakan dalam laporan ini bahwa pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dearah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; untuk saat ini masih relatif baru sehingga belum sepenuhnya difahami.

Mengingat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan evaluasi kinerja yang sangat penting dalam penyusunan program mendatang, oleh karena itu perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja aparatur dalam Instansi Pemerintah pada umumnya, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya pada khususnya.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kurang sempurna, oleh karena itu mohon saran dan bimbingan dari pihak-pihak berpengalaman (staceholders) penyusunan LKjIP mencapai kesempurnaan untuk masa mendatang.

Demikian, semoga bermanfaat khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya pada umumnya untuk perbaikan kinerja di masa-masa yang akan datang.